

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah sampai dengan menengah, pemerintah perlu melakukan pembangunan ekonomi dengan mendirikan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat yang lemah. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Kedua lembaga ini memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga pembiayaan yang dalam kegiatan usahanya tidak melakukan penghimpunan dana dan memberikan jasa seperti halnya bank contohnya perusahaan asuransi. Menurut Undang-Undang perbankan, bank dibedakan menjadi dua jenis yaitu bank umum dan BPR.

Menurut UUD Perbankan No. 10 tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang didalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya adalah kegiatan bank yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera daripada sebelumnya dengan menyalurkan kembali dana yang dihimpun kepada masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk kredit.

Dalam pemberian kredit, bank tidak terlepas dari suatu hambatan atau resiko yang bisa timbul karena adanya kredit macet dimana tidak terbayarnya kembali kredit tersebut. Kredit macet sering terjadi disebabkan oleh faktor eksternal (pihak peminjam) yang kurang mampu membayar kreditnya dan faktor internal (pihak Bank) akibat analisis pemberian persetujuan kredit yang kurang ketat sehingga memberikan dampak yang kurang baik bagi perbankan.

Kredit macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia, meskipun pemberian kredit merupakan penempatan dana yang paling menguntungkan namun sekaligus menjadi resiko besar yang dihadapi oleh bank. Maka dari itu sangat diperlukan sistem pengendalian intern yang kuat dan memadai sebagai dasar operasional yang sehat dan aman untuk menghindari terjadinya hal-hal yang merugikan bank.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip konvensional atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam melaksanakan usaha BPR merasakan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Dalam mengalokasikan kredit kepada calon debitur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu wajib memenuhi keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai perjanjian dan wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu tidak melebihi 20% dari modal yang diberikan BPR kepada sekelompok peminjam termasuk perusahaan dan tidak melebihi 10% dari modal yang diberikan kepada pemegang saham (dan keluarga) serta perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) dan memberikan agungan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai surat jaminan untuk melakukan pinjaman seperti surat tanah atau surat berharga.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Air Hitam adalah salah satu jenis bank yang menyalurkan dananya dalam bentuk kredit kepada pengusaha mikro kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk modal usaha. Semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat maka resiko yang akan terjadi semakin besar.

Tabel 1.1
Jumlah kredit yang disalurkan dan jumlah kredit macet
31 Desember 2015 dan 2016

Tahun	Jumlah Kredit Yang Disalurkan (Rupiah)	Jumlah Kredit Macet (Rupiah)
31 Desember 2015	4.184.500.000	117.279.000
31 Desember 2016	3.630.000.000	179.439.000

Sumber PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Air Hitam

Dari tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2015 total kredit yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 4.184.500.000. Dari jumlah pemberian kredit terdapat kredit macet sebesar Rp. 117.279.000 dengan rasio kredit bermasalah sebesar 2% dari jumlah kredit yang diberikan, sedangkan pada tahun 2016 total kredit yang diberikan sebesar Rp. 3.630.000.000 dan jumlah kredit macet sebesar Rp. 179.439.000 dengan rasio kredit bermasalah sebesar 4% dari jumlah kredit yang diberikan. Dari uraian diatas dapat dilihat jumlah kredit yang disalurkan pada tahun 2015 mengalami penurunan pada tahun 2016 sedangkan kredit macet pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015 begitu juga berdasarkan persentase. Jadi, kredit macet PT. BPR Mangatur Ganda Cabang Air Hitam masih tergolong wajar, hal ini didukung oleh peraturan “**Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014** bahwa bank dinilai memiliki potensi kesulitan apabila rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) jika lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit”.

Meskipun kredit macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Air Hitam tergolong wajar, namun bila tidak segera ditanggapi oleh pihak bank maka akan membahayakan kelangsungan usahanya. Sehingga untuk mengetahui adanya suatu penyimpangan atau kesalahan dalam suatu bank maka harus sering dilakukan evaluasi dan perlu ada sistem pengendalian intern pemberian kredit yang efektif untuk menghindari kredit macet. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti keefektifan sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT BPR Mangatur ganda Cabang Air hitam dengan mengajukan judul **“EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA PT BPR MANGATUR GANDA CABANG AIR HITAM”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Apakah pelaksanaan pengendalian intern dalam pemberian kredit pada PT. BPR Mangatur Ganda Cabang Air Hitam sudah berjalan efektif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran tentang penerapan pengendalian intern pemberian kredit pada PT. BPR Mangatur Ganda Cabang Air Hitam.

2. Untuk mengetahui tingkat keefektifan pengendalian intern dalam pemberian kredit pada PT. BPR Mangatur Ganda Cabang Air Hitam.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tidak hanya pada teori tetapi juga dalam praktek penerapan sistem pengendalian intern khususnya pada pemberian kredit.
2. Bagi perusahaan, dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam hal pengendalian intern pemberian kredit untuk menerapkan pengendalian intern yang baik dan efektif.
3. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi dan informasi tambahan dalam melakukan penelitian mengenai penerapan pengendalian intern terhadap pemberian kredit ditahun mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Evaluasi

2.1.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*evaluation*” yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Nurkencana (1983) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Maka dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah:

Suatu proses yang menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Dengan pengertian lain, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah dicapai.¹

2.2 Sistem Pengendalian Intern

2.2.1 Pengertian sistem pengendalian intern

Para perancang dan pemakai sistem sekarang ini tidak hanya harus memahami prosedur sistem yang baik, tetapi mereka juga harus mengetahui berbagai sifat sistem yang baru. Dengan demikian, perancang sistem dapat merancang sistem yang handal sehingga tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

Untuk mengurangi ancaman dan risiko terhadap sistem informasi akuntansi, diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang dirancang dan dijalankan dengan baik. Tanpa sistem pengendalian intern, sistem akan mudah dirusak atau mudah digunakan oleh orang yang tidak berhak.

Pengertian sistem pengendalian intern (SPI) sudah dilakukan oleh The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), sebuah organisasi profesi akuntansi yang cukup kuat di Amerika Serikat. Menurut AICPA, pengertian sistem pengendalian intern adalah rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakuratan dan keterpercayaan data akuntansi,

¹**Pengertian Evaluasi:** <http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-evaluasi-apa-itu-evaluasi.html?m=1>

meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

Menurut COSO, sistem pengendalian intern memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. **Sistem pengendalian intern merupakan sebuah proses, sehingga tidak pernah berhenti bekerja.**
- b. **Sangat dipengaruhi oleh orang dari berbagai tingkatan manajemen didalam perusahaan.**
- c. **Hanya dapat memberikan perlindungan secara reasonable (sewajarnya), karena harus memperhatikan keuntungan dan kerugian (cost and benefit).**
- d. **Ditujukan untuk melindungi tujuan perusahaan secara keseluruhan, tidak hanya terhadap laporan keuangan saja.**
- e. **Memiliki berbagai komponen yang berbeda-beda fungsinya namun saling terkait.²**

Pengendalian intern merupakan alat yang paling efektif untuk membantu pimpinan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi khususnya mengenai pengawasan. Tujuan dari alat ini adalah untuk melindungi kekayaan yang dimiliki perusahaan serta menjamin tersedianya informasi secara akurat dan para bawahannya. Pengendalian intern yang efektif dan efisien akan membuat pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan harapan dapat terealisasi dengan baik.

2.2.2 Tujuan Sistem pengendalian Intern

Sebuah sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur tersebut sering kali disebut sebagai pengendalian, dan secara kolektif, akan membentuk suatu pengendalian internal entitas. Menurut Randal manajemen biasanya memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yaitu:

- 1. Keandalan laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan bagi para investor, kreditor, dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan seperti**

²Wing Wahyu Winarno, **Sistem Informasi Akuntansi**, Cetakan Pertama: UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006, hal. 115

misalnya GGAP. Tujuan pengendalian internal yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini.

2. Efisiensi dan efektifitas kegiatan operasi. Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan. Sebuah tujuan penting atas pengendalian tersebut adalah akurasi informasi keuangan dan nonkeuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Perusahaan publik, perusahaan nonpublik, maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedang yang terkait dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.³

Manajemen merancang sistem pengendalian internal agar mencapai ketiga tujuan diatas. Fokus auditor dalam pengauditan atas laporan keuangan maupun audit atas pengendalian internal terletak pada pengendalian terhadap keandalan laporan keuangan ditambah beberapa pengendalian terhadap kegiatan operasional dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang dampak berdampak secara signifikan pada laporan keuangan.

Menurut Valery G. Kumat pengendalian intern adalah istilah baku yang berlaku sekarang ini untuk *built-in control*. Kita bisa menjumpai banyak referensi untuk mendefinisikannya. Berikut ini adalah beberapa definisi yaitu:

- Pengendalian internal yaitu suatu keadaan dimana terdapat sistem akuntansi yang memadai, sehingga menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen para pemilik atau pemegang saham kreditur dan para pemakai laporan keuangan (stakeholder) lain, yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi.
- Pengendalian internal adalah rencana, metode, prosedur, kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas

³RANDAL J. ELDER. et al.. **Jasa Audit dan Assurance**, Buku Satu: Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 316

tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain.

- Pengendalian intern adalah adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi untuk mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang).

2.2.3 Komponen Pengendalian Internal

Pengendalian internal klasik tidak terpisahkan dari perkembangan ilmu manajemen pada sistem pengendalian yang terdokumentasi dengan baik, mulai dari perencanaan (plan), pelaksanaan (do), evaluasi (check), dan pengembangan (act).

Sejalan dengan berjalannya waktu, semakin disadari adanya berbagai faktor yang masih perlu diartikulasikan lebih jauh, seperti faktor manusia (falsafah hidup, gaya hidup, perilaku, kompetensi) yang saling berinteraksi dalam lingkungan bisnis yang membentuk tata nilai (budaya) perusahaan, adanya risiko intrinsik atau risiko potensial yang kurang terbaca pada historical/current data, dan kelemahan komunikasi internal. Jadi, sejak akhir tahun 1992 *committee of sponsoring organizations of the treatway commission* (COSO) memperkenalkan kerangka pengendalian (*control framework*) yang terdiri dari 5 unsur sebagai berikut:

1. **Lingkungan pengendalian (*Control Environment*)**
2. **Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)**
3. **Prosedur Pengendalian (*Control Prosedur*)**
4. **Pemantauan (*Monitoring*)**

5. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)⁴

Adapun penjelasan untuk komponen pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*control Environment*)

Lingkungan pengendalian meliputi sikap para manajemen & karyawan terhadap pentingnya pengendalian internal organisasi. Faktor-faktor yang terkait dengan sikap dimaksud adalah:

- *Business Owner Philosophy (single majority atau Joint Management/Strategic Alignment)*
- *Management style (manajemen yang progressive atau conservative)*
- *Organization Structure (centralized atau Decentralized)*
- *HR & career Development (Seniority/loyalty-based atau Competency/Performance-based).*

Lingkungan pengendalian ini sangat penting karena menjadi dasar bagi efektivitas unsur-unsur pengendalian internal yang lain.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)

Semua organisasi menghadapi risiko, yaitu dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis (*profit* dan *non-profit*) maupun nonbisnis, risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis/dievaluasi sehingga bisa diperkirakan intensitas dan tindakan apa untuk meminimalkannya.

3. Prosedur pengendalian (*control procedure*)

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk standardisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan serta kesalahan. Prosedur pengendalian meliputi hal-hal berikut:

- Personel yang kompeten, mutasi tugas, dan cuti wajib.
- Pelimpahan tanggung jawab dan pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait.

⁴ Valery G Kumaat. **Internal Audit**, cetakan Pertama: Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 16

- Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset, dan operasi.

4. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian internal dapat dimonitor secara efektif melalui penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi.

Penilaian khusus biasanya dilakukan secara berkala ketika terjadi perubahan pokok dalam strategi manajemen senior, struktur korporasi, atau kegiatan usaha. Pada perusahaan besar, internal audit adalah pihak yang bertanggung atas pemantauan sistem pengendalian internal. Auditor independen juga sering melakukan penilaian atas pengendalian internal sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan.

5. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi merupakan unsur-unsur yang penting dari pengendalian internal perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan diperlukan oleh manajemen, untuk pedoman operasi, dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.

Menurut RANDAL kerangka terintegrasi-pengendalian internal COSO, kerangka pengendalian internal yang paling banyak diterima di AS, menjelaskan lima komponen pengendalian internal yang dirancang dan diterapkan manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendaliannya dapat terpenuhi. Masing-masing komponen berisi banyak pengendalian, namun auditor memberikan perhatian utama pada pengendalian yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Komponen pengendalian internal COSO terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pengawasan.

2.3 Bank

2.3.1 Pengertian Bank

Menurut Syamsu Iskandar bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral. Peranan bank sebagai lembaga keuangan baik dalam menghimpun dana masyarakat maupun

menyalurkannya kembali ke masyarakat semakin meningkat dalam kondisi perekonomian saat ini maupun dimasa yang akan datang, peranan perbankan mempunyai kedudukan yang strategis sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar arus lalu lintas pembayaran dirasaqn amat dibutuhkan.

Menurut Kasmir bank secara sederhana dapat diartikan sebagai:

Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.

Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah:

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

2.3.2 Sumber Dana Bank

Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat.

2.4 Pengertian dan Jenis-Jenis Kredit

2.4.1 Pengertian Kredit dan Unsur-unsur Kredit

Menurut asal mulanya, kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

⁵Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi Kedelapan: Rajawali, Jakarta, 2008, hal. 11

Sementara itu, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi, dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Dengan kata lain, pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna sehingga jika kita bicara kredit, termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak

tertagih, demikian pulak sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

5. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas bank kredit tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Ketentuan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit adalah kepercayaan dalam pemberian kredit, kesepakatan antara si pemberi dan si penerima kredit, jangka waktu mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati bersama, faktor risiko kerugian diakibatkan nasabah sengaja tidak membayar ataupun karena terkena bencana alam, dan balas jasa dari pemberian kredit yaitu keuntungan bank.

2.4.2 Tujuan Kredit dan Jenis-jenis Kredit

Yang dimaksudkan dengan tujuan kredit adalah tujuan ditinjau dari berbagai pihak. Bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur serta oleh pemerintah atau masyarakat umum, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi bank

- a. Assets yang dominan dan sumber utama pendapatan bank yang menjamin kelangsungan hidup bank.
- b. Sebagai instrumen bank dalam persaingan dan pemasaran produk-produk perbankan lainnya.
- c. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sehingga menciptakan lapangan kerja.
- d. Kredit yang sehat menjadi instrumen untuk memelihara likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas bank.

2. Bagi pengusaha

- a. Kegiatan usaha bertambah lancar dan performance perusahaan bertambah baik.
- b. Dengan mendapatkan fasilitas kredit, maka akan meningkatkan volume usaha dan hasil usaha agar terjamin kelangsungan hidup perusahaan.
- c. Meningkatkan motivasi pengusaha.

3. Bagi masyarakat/pemerintah

- a. Berfungsi sebagai instrumen untuk kebijakan ekonomi dan moneter.
- b. Meningkatkan arus dan daya guna uang serta menghidupkan ekonomi pasar.
- c. Meningkatkan kegiatan produksi, perdagangan, distribusi dan konsumsi secara nasional (makro).
- d. Membantu efisiensi penggunaan sumber alam.

Dengan beragamnya produk perbankan dewasa ini, maka timbul produk-produk baru dari bank sesuai dengan karakteristik bank yang membidangnya. Jenis kredit ini perlu diketahui agar pemberian kredit dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian kredit itu tepat kepada obyek kredit (kegiatan usaha).
2. Dapat mencapai efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
3. Membantu kemudahan dalam perencanaan kredit dan pengawasannya.
4. Memberikan keuntungan atau hasil (benefit) bagi bank, pengusaha dan juga masyarakat.

Menurut syamsu iskandar jenis kredit yang diberikan oleh bank yaitu:

- 1. Berdasarkan Sektor Ekonomi :**
 - **Kredit pertanian, kredit kehutanan dan kredit perkebunan**
 - **Kredit pertambangan dan perindustrian**
 - **Kredit perdagangan, hotel dan jasa**

- Kredit sumber tenaga, gas dan listrik
 - Kredit konstruksi
 - Kredit perumahan
 - Dan lain-lain
2. Berdasarkan asal dana :
 - Kredit dengan dana dalam negeri yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank yang dananya berasal dari dalam negeri.
 - Kredit dengan dana luar negeri yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank yang dananya berasal dari luar negeri
 3. Dilihat dari segi jangka waktu lamanya fasilitas kredit :
 - Kredit Jangka Pendek yaitu fasilitas kredit yang masa lakunya sampai dengan 1 tahun. KMK-Ekspor, KMK Umum, KMK KUK
 - Kredit Jangka Menengah yaitu fasilitas kredit yang masa lakunya dari satu tahun sampai dengan 3 tahun. Kredit konstruksi
 - Kredit Jangka Panjang yaitu fasilitas kredit yang masa lakunya lebih dari tiga tahun, misalkan : KPR, KI perkebunan
 4. Dilihat dari kebijaksanaan fasilitas kredit :
 1. Kredit Umum yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk semua golongan masyarakat atau perusahaan.
 2. Kredit Prioritas yaitu fasilitas kredit yang diberikan kepada golongan tertentu, misalkan : KUK, PIR
 5. Dilihat dari sifat kredit :
 - Kredit Berulang (revolving) yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank yang dapat diperpanjang jangka waktunya sepanjang masih dibutuhkan, misalkan : KMK-UMUM
 - Kredit Aflopendy yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank yang pelunasannya sesuai dengan angsuran yang disepakati bersama, misalkan Kredit Investasi (KI)
 - Kredit Transaksional (enmalig) yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank sesuai dengan kebutuhan pembiayaannya dan apabila nasabah masih membutuhkan lagi maka harus mengajukan permohonan kredit baru, misalkan : KMK-Ekspor, KMK-Konstruksi
 6. Dilihat dari segi tujuan fasilitas kredit :
 - Kredit Modal kerja yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk menambah modal kerja usaha.
 - Kredit Investasi yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk pembelian barang modal usaha.

- **Kredit Konsumtif** yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk dipakai memenuhi kebutuhan sendiri.
7. **Dilihat dari segi non cash fasilitas kredit :**
- **Tender Bond** yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh Bank untuk persyaratan pengajuan tender.
 - **Performance Bond** yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan.
 - **Advance Payment bond** yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk selama masa pemeliharaan.
8. **Dilihat dari segi dokumen fasilitas kredit :**
- **Kredit dokumenter** yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk transaksi L/C dalam negeri maupun L/C perdagangan internasional.⁶

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa jenis-jenis kredit adalah berdasarkan sektor ekonomi, asal dana, jangka waktu fasilitas lamanya fasilitas kredit, kebijaksanaan fasilitas kredit, sifat kredit, tujuan fasilitas kredit, non cash fasilitas kredit, dan dokumen fasilitas kredit.

2.4.3 Syarat kredit (*Term of Lending*)

Syarat kredit memuat berbagai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank atas kredit baru atau berulang (revolving) sejak dari tanggal persetujuan kredit sampai dengan pelunasan (repayment). Maksud dari persyaratan kredit :

1. Agar bank mempunyai waktu untuk mengatur likuiditasnya
2. Bank dapat mengetahui perkembangan usaha nasabah
3. Untuk mengetahui penggunaan kredit oleh nasabah sesuai atau menyimpang dari kesepakatan.

Unsur-unsur yang harus diperhatikan :

1. Syarat-syarat kredit harus dipatuhi kedua pihak
2. Bank berhak untuk mengakselerasi pembayaran kredit pada waktu yang diperlukan.
3. Memeriksa proyeksi arus kas atau cash flow projection nasabah
4. Menghindari kerugian kedua belah pihak.

⁶Syamsu Iskandar, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Kedua: IN MEDIA, Jakarta, 2013, hal 119-120

2.4.4 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pinjaman, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Penilaian kredit dengan metode analisis 5C kredit menurut Kasmir adalah:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Condition*
5. *collateral*⁷

Adapun penjelasan mengenai metode analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character* adalah sifat atau watak seseorang atau pribadi dari debitur untuk mendapatkan kredit yang dinilai dari latar belakang nasabah seperti kejujuran, sikap motivasi usaha, gaya hidup dan lain sebagainya.
2. *Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah membayar kredit. modal yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, khususnya dalam likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan soliditasnya.
3. *Capital* (modal) adalah kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dan menganalisis sumber modal tersebut.
4. *Condition* (kondisi ekonomi) adalah keadaan ekonomi sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang dengan

⁷Kasmir, **Dasar-dasar Perbankan**, cetakan kedua belas, RajaGrafindo Persada, 2014, hal.136

menilai kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik.

5. *Collateral* adalah jaminan yang harus disediakan dan diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik yang melebihi jumlah kredit yang diberikan oleh pihak bank.

Penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut :

1. *personality*

Yaitu sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik maka kredit dapat diberikan. Sebaliknya apabila kepribadiannya jelek maka kredit tidak dapat diberikan.

2. *party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari lembaga pembiayaan kredit atau bank.

3. *purpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam, misalnya apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4. *prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi akan tetapi juga nasabah.

5. *payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperoleh. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik, maka jika salah satu usaha merugikan akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *profitability*

Yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode-periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan suatu perlindungan berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi.

2.4.5 Pengertian dan Tujuan pengendalian intern pemberian kredit

Kredit merupakan pendapatan utama dari suatu bank. Jika pemberian kredit dilakukan secara tidak hati-hati maka akan terjadi kredit macet. Kredit macet bagi suatu bank merupakan masalah yang harus dihindari, karena terjadinya kredit macet berarti akan menjadi kerugian suatu bank. Salah satu cara untuk menghindari kredit macet adalah dengan adanya pengendalian intern pemberian kredit yang baik pada bank tersebut. Pengendalian internal kredit mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet, menurut Malayu S.P. Hasibuan **“Pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet”**.⁸ Lancar dan produktif artinya kredit atau pinjaman itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Berdasarkan pengertian di atas pengendalian intern juga memiliki tujuan dimana, menurut Malayu S.P. Hasibuan tujuan pengendalian internal pemberian kredit adalah untuk:

⁸Malayu S.P Hasibuan, **Dasar-Dasar Perbankan**: Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 105.

1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman;
2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak;
3. Melakukantindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah;
4. Mengevaluasiapakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan;
5. Memperbaikikesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali;
6. Mengetahuiposisi persentase *collectability credit* yang disalurkan bank;
7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank;⁹

2.4.6 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kalayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum menurut Kasmir adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas
2. Penyelidikan berkas pinjaman
3. Wawancara awal
4. *On the spot*
5. Wawancara II
6. Keputusan kredit
7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
8. Realisasi kredit
9. Penyaluran/penarikan dana¹⁰

Adapun penjelasan mengenai prosedur pemberian kredit adalah:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-

⁹Malayu S.P Hasibuan, *Loc.Cit*

¹⁰ Kasmir, *Op.Cit.*, hal.143

berkas lainya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut :

- a. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
- b. Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca da laporan laba rugi) tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak kreditur tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka, dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada pemohon.
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
- e. Jaminan kredi, Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada

unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- a. Akte Notaris, dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau yayasan.
- b. TDP (Tanda Daftar Perusahaan), merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh departemen perindustrian dan perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.
- c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.
- d. Neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir.
- e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
- f. Foto kopi sertifikat jaminan.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perusahaan perkreditan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara Awal

Merupakan penyidikan kepada calon debitur dengan langsung berhadapan dengan calon debitur, untuk menyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan pihak kreditur inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilek mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima.
- b. Jangka waktu kredit.
- c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar.

7. Penandatanganan akad kredit / perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara pihak kreditur dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan dan juga memberikan langsung sesuai jenis kredit.

9. Penyaluran kredit

Adalah pencairan atau pengambilan uang atau barang sesuai jenis kredit sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau bertahap.

2.4.7 Kriteria Pengendalian Intern Pemberian Kredit yang Efektif

Setiap bank harus memiliki struktur pengendalian intern yang memadai dalam pemberian kredit kepada debitur. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang nantinya akan mengakibatkan penurunan profitabilitas. Pengendalian ini dimaksudkan antara lain untuk menilai dan membandingkan pelaksanaan yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi berdasarkan perencanaan semula. Pengendalian menjadi alat koreksi dan meluruskan kembali kearah yang sudah ditetapkan semula dalam perencanaan, meluruskan arah, serta menghindari kerugian dari akibat penyimpangan berupa kesalahan pencatatan, menghilangkan dengan sengaja, otorisasi yang tidak semestinya, pelaksanaan yang tidak efektif dan efisien, serta kecurangan dan pencurian.

Setiap bank harus memiliki struktur pengendalian intern yang memadai dalam pemberian kredit kepada debitur. Hali ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang natinya akan mengakibatkan penurunan profitabilitas. Beberapa pokok utama dalam intern kredit menurut Tjukria P. Tawaf (dalam skripsi Anderson Marbun) adalah :

- 1. Harus ada sistem pengendalian intern yang baik dalam arti ada pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pemasaran kredit kepada debitur, penagihan, analisis administrasi kredit, dan taksasi agunan.**
- 2. Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui direksi. Kebijakan tertulis mengenai kredit paling tidak harus memuat ketentuan mengenai limit cabang dan limit pemberi persetujuan; ketentuan mengenai jenis kredit yang dilarang; ketentuan mengenai jangka waktu kredit (maksimum dan minimum); ketentuan mengenai tingkat bunga dan provisi; ketentuan mengenai perbandingan antara kredit dengan jaminan; informasi keuangan yang harus diperoleh dari debitur; konsentrasi kredit; dan pengertian kredit bermasalah dan penanganannya.**
- 3. Harus ada aparat yang kompeten yang akan memproses kredit. Artinya para pengelola kredit di koperasi harus mempunyai pengetahuan yang cukup serta keterampilan yang memadai dalam menangani permasalahan kreditnya.**
- 4. Harus ada fungsi review terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu memantau pelaksanaan review serta pemantauan tindak lanjut atas masalah yang ada harus dilakukan secara terus menerus dan dibangun dengan sistem yang**

terorganisir sehingga mampu melakukan deteksi dini atas permasalahan yang ada berikut penanganan tindak lanjutnya.¹¹

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengendalian intern yang efektif dalam pemberian kredit adalah :

1. Adanya pemisahan fungsi antara pejabat yang terkait,
2. Adanya kebijakan atau peraturan yang ketat terhadap pemberian kredit,
3. Adanya pejabat yang kompeten dibidangnya
4. Adanya *review* terhadap pelaksanaan kredit yang telah diberikan secara terus menerus.

¹¹Hendrik Elisa Sutejo Samosir, Skripsi : **Analisis Efektifitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Sidikalang**, Universitas HKBP Nommensen, hal. 29

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian

Objek penelitian adalah variabel yang menjadi perhatian suatu penelitian. Sehingga yang menjadi objek penelitian adalah Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern pemberian Kredit pada PT. BPR Mangatur Ganda Cabang Air Hitam, yang beralamat di Desa Air hitam Labuhan Batu Utara

Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang diangkat, dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya yang terjadi di suatu perusahaan. Kemudian menganalisis data dan fakta yang diperoleh untuk menarik kesimpulan tentang keadaan perusahaan.

Populasi dan Sampel

Populasi

Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah "**Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti.**"¹² Sesuai dengan pendapat tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai

¹²Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul jannah, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 119

atau karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Air Hitam sehingga jumlah populasinya sebanyak 11 orang.

Sampel

Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah “**...sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti.**”¹³ Maka yang menjadi sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Menurut Joko Ade Nursiyono “**Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel yang hanya menurut kriteria, pemikiran atau pengetahuan pengambil sampel**”¹⁴ Maka berdasarkan pengertian diatas penulis menggunakan tiga kriteria untuk memilih sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Karyawan atau pegawai tetap pada PT. BPR Mangatur Ganda Cabang Air Hitam.
2. Karyawan atau pegawai yang sudah bekerja minimal 1 tahun.
3. Karyawan atau pegawai yang ditempatkan pada bagian kredit yaitu kepala bidang kredit, pemasaran kredit, administrasi kredit, kasir dan bagian pemeriksa berkas atau dokumen peminjam untuk pencairan kredit.

Berdasarkan kriteria diatas, maka yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 7 orang.

¹³Bambang dan Lina, **Loc.Cit**

¹⁴ Joko Ade Nursiyono, **Kompas Teknik Pengambilan Sampel**, IN MEDIA, Bogor, 2015, hal. 25

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data yang diperoleh dengan membagikan kuesioner yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu kepada pihak-pihak yang terkait dalam pemberian kredit pada PT. BPR Mangatur Ganda Cabang Air Hitam.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan berupa data dan dokumen pendukung yang ada dalam proses pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Air Hitam.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan metode kepustakaan dan metode lapangan.

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku akuntansi perbankan, audit internal, dasar-dasar perbankan, refrensi dan masalah kredit yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti sebagai pedoman dalam melakukan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pembahasan masalah sebagai dasar perbandingan praktek dilapangan.

2. Penelitian lapangan

a. Kuesioner

Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jamah “**Kuesioner berisikan daftar pertanyaan yang mengukur variabel-variabel, hubungan diantara variabel yang ada, atau juga pengalaman atau opini dari responden**”.¹⁵ Maka dari penjelasan diatas cara yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan memberikan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner untuk penelitian ini disusun dengan menggunakan sub elemen pengendalian intern sebagai panduannya yang akan diserahkan kepada pejabat yang berwenang serta karyawan yang terlibat dalam proses pemberian kredit.

b. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen yang terkait langsung dengan penelitian berupa catatan atau dokumentasi serta laporan tertulis lainnya seperti jumlah kredit yang diajukan, nilai jaminan, dan kredit yang disetujui oleh PT. BPR Mangatur Ganda Cabang Air Hitam.

¹⁵ Bambang dan Lina, **Op.Cit.**, hal.143

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode champion. Penggunaan metode ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darman Sato Zebua dengan judul penelitian Analisis efektivitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada PT. Bank Sumut Medan Cabang Iskandar Muda, Amira Ahmad dengan judul penelitian Tinjauan Efektifitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT. Bank Mega Cabang Makassar dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit (Studi kasus pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali)

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka peneliti menggunakan rumus Champion sebagai alat pengukuran untuk mengukur tingkat Efektivitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit, dimana alternatif jawaban dari koesioner yang dibuat penulis yaitu “Ya” , “Tidak” dan “Tidak Relevan”. Sebagai ukuran tingkat kesesuaian dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga responden cukup memilih salah satu jawaban yang dianggap paling cocok menurut responden dari ketiga alternatif jawaban tersebut. Setelah koesioner disebarakan pada bagian kredit dan telah dijawab semua, maka hasil jawaban koesioner akan dihitung dengan menggunakan skala penilaian berdasarkan rumusan Champion.

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Jumlah Jawaban ya}}{\text{Jumlah Jawaban Kuesioner}} \times 100\%$$

Presentasi penelitian berdasarkan rumusan champion:

1. **0,00 – 0,25 = *No association or low association (weak association)***
2. **0,26 – 0,50 = *Moderately low association (moderation association)***

3. $0,51 - 0,75 = \textit{Moderately high association (moderation strong association)}$
4. $0,76 - 1,00 = \textit{High association (strong association up to perfect association)}^{16}$

Berdasarkan klasifikasi diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. $0,00 - 0,25 =$ Pengendalian intern dalam pemberian kredit tidak efektif
2. $0,26 - 0,50 =$ Pengendalian intern dalam pemberian kredit kurang efektif
3. $0,51 - 0,75 =$ Pengendalian intern dalam pemberian kredit cukup efektif
4. $0,76 - 1,00 =$ Pengendalian intern dalam pemberian kredit sangat efektif.

¹⁶Ahmad Amirah, Skripsi : **Tinjaun Efektivitas penerapan pengendalian internal pemberian kredit pada PT. Bank Mega Cabang Makassar**, Universitas Hasanuddin Makassar, hal. 52

